



RENCANA KERJA / TAHUN 2023

disdukcapil
Jabar

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung Tlp. (022) 2031044 - 2031405 / 2031405
www.disdukcapil.jabarprov.go.id - dukcapil@jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaannirrohiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan berkah dan rahmat Nya penyusunan Rencana Kerja 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

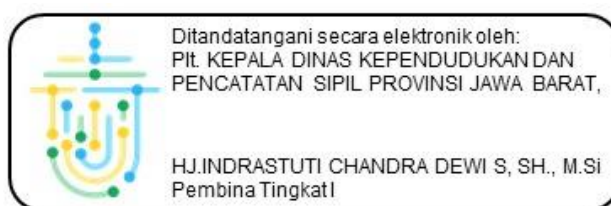
Rencana Kerja tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat. Renja tahun 2023 disusun sebagai pedoman operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif.

Semoga dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja 2023, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 ini belumlah sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Renja ini.

Bandung, 07 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil	25
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2022.....	10
Tabel T-II.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan	16
Tabel T-II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat	17
Tabel T-II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022.....	18
Tabel T-II.5 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	24
Tabel T-III. 1 Program dan Kegiatan Indikatif Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel T-III. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ber sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Disdukcapil dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Barat tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2023 bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan RKPD Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, Serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ;
3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

1.3. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Disdukcapil Provinsi

Jawa Barat Tahun 2022 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.

Menjelaskan *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023.

Menjelaskan hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

3.3 Program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan. Berdasarkan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/melebihi;
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menilai pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2022 yang dibandingkan dengan Renstra Disdukcapil Tahun 2018-2023 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Disdukcapil Tahun 2022 merencanakan 5 program dan 12 kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 12 kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Disdukcapil sampai dengan Tahun 2022, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.						
1					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
2	12		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																															
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																															
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	50.847.750.000	BB	12.557.942.167	A	14.114.247.598	BB	2.700.448.793	BB	3.729.756.426	80,45	3.601.563.390	80,45	3.175.536.551	80,45	13.207.305.160	80,45	93,57	80,45	25.765.247.327	80,45	50,67							
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi	100	Persen		100		100		25		25		25																		
				Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen		100		100		25		25		25																		
2	12	01	L01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	30	Dokumen	1.853.750.000	10	388.486.029	10	255.860.921	1	110.16.300	4	70.341.111	3	30.272.189	2	132.914.370	10	244.543.970	100,00	95,58	20	633.029.999	66,67	34,18	Sekretariat					
2	12	01	L01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	21	Dokumen	450.000.000	7	65.894.500	7	105.000.000	1	10.551.300	3	51.765.000	1	5.533.000	2	32.215.170	7	99.884.470	100,00	95,03	14	165.078.970	66,67	36,68	Sekretariat				
2	12	01	L01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	192.750.000	2	180.563.964	1	8.543.516						1	17.818.000	1	17.818.000	100,00	96,07	3	168.378.964	100,00	87,36	Sekretariat					
2	12	01	L01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	776.000.000	2	170.780.315	1	27.317.385						1	24.397.500	1	24.397.500	100,00	89,31	3	195.077.815	100,00	25,15	Sekretariat					
2	12	01	L01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9	Dokumen	435.000.000	3	194.7250	3	105.000.000		465.000	1	18.576.111	1	24.919.189	1	58.486.700	3	102.447.000	100,00	97,57	6	104.394.250	66,67	24,00	Sekretariat				
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																		100,00	94,52															
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															
2	12	01	L02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	9	Dokumen	34.488.000.000	3	8.581.338.467	3	9.892.660.003		2.089.691.799	1	2.596.545.369	1	2.613.244.798	1	1.884.088.702	3	9.183.379.668	100,00	92,83	6	17.764.909.135	66,67	51,51						
2	12	01	L02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan	42	Bulan	34.053.000.000	14	8.578.280.467	14	9.816.136.003	3	2.084.162.799	4	2.587.363.369	4	2.605.893.798	3	1.835.946.339	14	9.112.666.305	100,00	92,83	28	17.690.946.772	66,67	51,95	Sekretariat				
2	12	01	L02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	9	Lap	435.000.000	3	3.058.000	3	76.524.000		5.529.000	1	9.182.000	1	8.051.000	1	48.142.343	3	70.904.363	100,00	92,66	6	73.962.363	66,67	17,00	Sekretariat				
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																		100,00	92,74															
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
							I		II		III		IV		K		Rp.		K		Rp.								K		Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.
1	2.12.01.1.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkatkan Disiplin dan Kapasitasnya	135	Orang	2.035.000.000	45	554.783.645	45	249.721.139	-	3	74.495.000	3	76.629.900	1	45.742.000	7	196.866.900	15,56	93,87	52	751.650.545	38,52	36,94							
2	2.12.01.1.0.5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135	Orang	224.000.000	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	33,33	-	Sekretariat	Belum adanya pelaksanaan Diklat PIM					
3	2.12.01.1.0.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan se Jawa Barat	9	Kali	1476.000.000	3	469.793.645	3	129.721.130	-	3	74.495.000	-	-	-	45.102.000	3	19.607.000	80,00	92,20	6	589.400.645	66,67	39,93	Sekretariat						
4	2.12.01.1.0.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek kepada Kab/ Kota	12	Kali	335.000.000	4	84.990.000	4	80.000.000	-	-	-	4	76.629.900	-	610.000	4	77.259.900	80,00	96,57	8	162.249.900	66,67	48,43	Sekretariat						
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																			66,67	62,93		66,67	44,18									
Predikat kinerja																			Sedang	Rendah		Sedang	Rendah									
2.12.01.1.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	36	Bulan	5.456.000.000	12	1.271.717.416	12	1.771.712.108	3	345.916.557	3	434.912.125	3	406.592.471	3	507.327.770	12	1.694.648.923	100,00	95,65	24	2.966.366.339	66,67	54,37	Sekretariat						
2.12.01.1.0.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36	Bulan	1.657.000.000	12	243.689.343	12	614.982.564	3	144.418.500	3	176.597.500	3	180.770.995	3	182.466.321	12	584.250.316	80,00	95,00	24	827.939.459	66,67	49,97	Sekretariat						
2.12.01.1.0.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan logistik penanganan covid 19 DAK Non Fisik	36	Jenis	83.000.000	12	84.887.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.12.01.1.0.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	36	Bulan	3.686.000.000	12	943.141.273	12	1.156.729.544	3	201.501.057	3	258.314.625	3	295.821.476	3	354.761.449	12	1.110.398.607	80,00	95,99	24	2.053.519.880	66,67	56,79	Sekretariat						
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																			100,00	95,50		66,67	53,38									
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Rendah									
2.12.01.1.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat	36	Bulan	4.875.000.000	12	1.315.243.533	12	1.170.413.436	3	173.965.137	3	324.445.456	3	264.302.215	3	362.985.952	12	1.125.698.760	100,00	96,18	24	2.440.942.293	66,67	50,97	Sekretariat						
2.12.01.1.0.8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Bulan	950.000.000	12	217.092.737	12	67.280.000	3	12.366.631	3	12.390.947	3	13.896.706	3	25.767.940	12	63.722.224	80,00	94,71	24	280.814.961	66,67	29,56	Sekretariat						
2.12.01.1.0.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Bulan	3.925.000.000	12	1.098.150.796	12	1.103.133.436	3	161.598.506	3	312.054.509	3	251.835.509	3	337.218.012	12	1.061.976.536	80,00	96,27	24	2.160.127.332	66,67	55,04	Sekretariat						
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																			100,00	95,49		66,67	42,30									
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Rendah									
2.12.01.1.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Bulan	2.140.000.000	12	446.373.077	12	813.880.000	3	79.859.000	3	229.017.365	3	210.521.817	3	242.577.757	12	761.975.939	100,00	93,62	24	1.208.349.916	66,67	56,46	Sekretariat						
2.12.01.1.0.9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36	Bulan	700.000.000	12	202.474.998	12	336.880.000	3	42.306.000	3	89.599.185	3	32.550.000	3	117.390.900	12	311.846.015	80,00	98,41	24	514.321.013	66,67	73,47	Sekretariat						
2.12.01.1.0.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	36	Bulan	770.000.000	12	88.646.149	12	146.000.000	3	-	3	58.830.000	3	400.000	3	77.358.797	12	156.588.797	80,00	93,55	24	325.234.946	66,67	42,24	Sekretariat						
2.12.01.1.0.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	36	Bulan	670.000.000	12	55.251.930	12	351.000.000	3	37.553.000	3	80.588.250	3	177.571.817	3	178.281.060	12	313.541.127	80,00	89,33	24	368.793.057	66,67	55,04	Sekretariat						
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																			100,00	93,76		66,67	56,92									
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Rendah									
Rata-rata Capaian kinerja Program (%)																			85,93	94,62		61,98	47,25									
Predikat kinerja																			Tinggi	Sangat Tinggi		Rendah	Rendah									

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021		Target kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	I		II				III		IV				K	Rp.	K	Rp.	
					5	6		7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18			19	20	21	22	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	247,30	Persen	1.336.000.000	83,92	129.566.500	82,42	387.366.875		31.936.371		62.128.600		91.375.280	84,31	186.608.274	84,31	372.048.825	102,29	96,05	168	50.1618.325	68,03	37,55	PPAK	
		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	81	Kab/Kota	668.000.000	27	65.549.000	27	284.185.000	-	14.600.000	9	36.662.250	9	71.469.280	9	149.810.474	27	272.542.004	100,00	95,90	54	338.091.004	66,67	50,61	PPAK	
		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah pengelolaan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	81	Kab/Kota	668.000.000	27	65.549.000	27	284.185.000	-	14.600.000	9	36.662.250	9	71.469.280	9	149.810.474	27	272.542.004	100,00	95,90	54	338.091.004	66,67	50,61	PPAK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,90			66,67	50,61											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah											
		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	81	Kab/Kota	668.000.000	27	64.017.500	27	103.181.875	3	17.336.371	9	25.466.350	6	19.906.000	9	36.798.100	27	99.506.821	100,00	96,44	54	163.524.321	66,67	24,48	PPAK	
		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di Kab/ Kota	18	dokumen	668.000.000	6	64.017.500	6	103.181.875	1	17.336.371	2	25.466.350	3	19.906.000	2	36.798.100	6	99.506.821	100,00	96,44	12	163.524.321	66,67	24,48	PPAK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,44			66,67	24,48											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah											
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	96,17			66,67	62,85											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah											
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	247,30	Persen	1.532.000.000	90,45	339.725.910	82,42	385.454.830		42.829.509		91.722.408		139.931.510	95,11	102.306.770	95,11	376.790.197	115,40	97,75	186	716.516.107	75,03	46,77	PPAK	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil	81	Kab/Kota	1.532.000.000	27	339.725.910	27	385.454.830	5	42.829.509	6	91.722.408	9	139.931.510	7	102.306.770	27	376.790.197	100,00	97,75	54	716.516.107	66,67	46,77	PPAK	
		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil	18	elemen	1.532.000.000	6	284.182.260	6	270.000.000	1	27.492.960	2	64.523.308	2	119.875.710	1	54.985.920	6	266.877.398	100,00	98,84	12	551.060.158	66,67	54,45	PPAK	
		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kab/ Kota	18	dok	1.532.000.000	6	55.543.650	6	115.454.830	1	15.336.549	2	27.099.800	1	20.055.800	2	47.320.850	6	109.912.299	100,00	95,20	12	105.455.949	66,67	31,82	PPAK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,02			66,67	43,14											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah											
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	97,75			66,67	36,45											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah											
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	250,70	Persen	3.440.000.000	83,57	623.184.020	83,57	565.818.138		72.830.702		215.844.384		188.462.100	84,94	76.305.840	84,94	553.442.936	101,64	97,81	169	1.176.626.956	67,22	34,20	PIAK	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	96	Dokumen	2.190.000.000	32	405.028.270	32	191.280.000	8	17.197.500	10	80.594.480	10	74.366.000	10	15.262.000	28	187.419.980	87,50	97,98	60	592.448.250	62,50	27,05	PIAK	
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	81	Dokumen	990.000.000	27	19.127.680	27	95.640.000		4.229.500	9	12.638.000	17	7193.1500	1	4.806.000	27	93.605.000	100,00	97,87	54	284.876.680	66,67	28,78	PIAK	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah rapat (sosialisasi/fgd) dalam rangka pemanfaatan data kependudukan Jawa Barat	12	Rapat	1.200.000.000	4	213.756.590	4	95.640.000	1	12.968.000	2	67956.480	1	2.434.500		10.456.000	4	93.814.980	100,00	98,09	8	307.571.570	66,67	25,63	PIAK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,98			66,67	27,20											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah											

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																					
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	I		II				III					IV		K	Rp.	K	Rp.															
1	12	64	L03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	81	Nab/Kota	1.250.000.000	27	318.155.750	27	374.538.138	7	55.633.202	9	135.249.984	9	114.096.010		61.043.840	25	366.022.956	92,59	97,73	52	11=6+12	15=11*100	64,20	46,73	PIAK													
	1	12	64	L03	61	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	81	Dok	675.000.000	27	139.035.750	27	278.898.138	-	36.052.920	9	65.377.380	12	112.800.000	6	61.043.840	27	273.624.150	100,00	98,11	54	412.659.900	66,67	61,13	PIAK												
	1	12	64	L03	62	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta pembinaan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	324	orang	575.000.000	108	79.120.000	108	95.640.000	-	19.580.282	108	69.912.524	-	2.886.000	-	108	92.398.806	100,00	96,61	216	171.518.806	66,67	29,83	PIAK													
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,36		66,67	45,48																											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Sangat Rendah																											
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												90,05	97,85		63,35	36,89																											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Rendah	Sangat Rendah																											
1	12	65	L01	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	300	Persen	321.000.000	100	56.048.750	100	71.730.000		12.042.000		16.620.438	100	36.271.520		5.435.000	100,00	70.368.958	100,00	98,10	200	126.417.708	66,67	39,38	PIAK														
1	12	65	L01	1	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	9	Dok	321.000.000	3	56.048.750	3	71.730.000	-	12.042.000	1	16.620.438	2	36.271.520		5.435.000	3	70.368.958	100,00	98,10	6	126.417.708	66,67	39,38	PIAK													
1	12	65	L01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat	9	Dok	321.000.000	3	56.048.750	3	71.730.000	-	12.042.000	1	16.620.438	2	36.271.520		5.435.000	3	70.368.958	100,00	98,10	6	126.417.708	66,67	39,38	PIAK													
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,10		66,67	39,38																											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Sangat Rendah																											
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	98,10		66,67	39,38																											
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Sangat Rendah																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												99,96	96,66		71,48	41,71																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Sangat Rendah																											
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Diterapkannya sistem pelaksanaan kegiatan secara team of team																																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perubahan beberapa komponen yang dapat di realisasikan setelah penetapan perubahan																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya*):																																											

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat.
2. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan 2023 dan untuk tahun 2022 hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel II.3.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Kependuduk Digital dalam genggaman;
2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam rangka pelayanan membahagiakan masyarakat;
3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
4. Dukungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan isi-isu penting tersebut telah dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Kependuduk Digital dalam genggaman
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi mengkoordinir dan memfasilitasi kabupaten/kota yang akan menerapkan SIAK terpusat;
 - b. Seluruh Kabupaten/Kota siap melaksanakan SIAK terpusat Tahun 2023;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota melatih dan menyediakan petugas Administrator Database Kependudukan (ADB) untuk dijadikan sebagai super user SIAK terpusat;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota menyiapkan para operator SIAK yang akan dilatih Tim Teknis.

2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam rangka pelayanan membahagiakan masyarakat
 - a. Dengan budaya kerja dan semangat “Dukcapil BISA” memaknai bahwa Berkarya, Inovatif/Inovatif, Sabar, Amanah/Adaptif harus terus dibangun, sebagai passion dalam pelayanan yang membahagiakan masyarakat;
 - b. Penerbitan Identitas Kependudukan merupakan hulu dari pelayanan administrasi kependudukan melalui NIK bagi Penduduk;
 - c. Evaluasi terhadap layanan Dukcapil dalam penambahan indikator terkait penerapan buku pokok pemakaman/pelaporan kematian dari desa/kelurahan dengan target minimal 10 per kabupaten/kota;
 - d. Merealisasikan pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian;
 - e. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mewujudkan layanan Adminduk, digital dalam genggaman;
 - g. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas, melakukan branding baru layanan Dukcapil dengan langkah-langkah antara

lain: melakukan sosialisasi Single Identity Berbasis Nomor Induk Kependudukan, mewujudkan pelayanan yang cepat/tidak membiarkan penundaan berlarut dalam pelayanan, aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat.

3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
 - a. Sinkronisasi data Kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Melaksanakan koordinasi, evaluasi terkait Data Kependudukan.

4. Dukungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024
 - a. Koordinasi Sinkronisasi data penduduk dan data pemilih akan dilakukan secara terpusat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak perlu menyerahkan data penduduk by name by address kepada KPUD;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota menuntaskan perekaman KTP-el termasuk mulai melakukan perekaman terhadap pemilih pemula tahun 2022 dan 2023 melalui perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah dan tempat lain yang membutuhkan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas data kependudukan.

Tabel T-II.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Reformasi Birokrasi yang rendah	Belum optimalnya satu nama satu data kependudukan di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Akurasi data kependudukan . - Tingkat penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan belum optimal - Tingkat Pemanfaatan data kependudukan yang masih rendah - Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan masih di bawah target

Tabel T-II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat				81,12%	81,83%	82,63%	83,47%	82,50%	82,22%	84,81%	84,29%	

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Tabel T-II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai		16.811.000.000,-	A	Nilai		13.367.553.751,-	APBD
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Umum	100	Persen			100	Persen			
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen			100	Persen			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	10	Dokumen	Jawa Barat	350.000.000,-	10	Dokumen	Jawa Barat	150.000.000,-	APBD
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	Dokumen	Jawa Barat	175.000.000,-	7	Dokumen	Jawa Barat	75.000.000,-	APBD
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	Jawa Barat	175.000.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	75.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	3	Dokumen	Jawa Barat	11.175.000.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	9.689.069.298,-	APBD
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	Jawa Barat	11.000.000.000,-	14	Bulan	Jawa Barat	9.629.069.298,-	APBD
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	Jawa Barat	175.000.000,-	3	Laporan	Jawa Barat	60.000.000,-	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	45	Orang	Jawa Barat	100.000.000,-	45	Orang	Jawa Barat	46.100.000,-	APBD
3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45	Orang	Jawa Barat	100.000.000,-	45	Orang	Jawa Barat	46.100.000,-	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	12	Bulan	Jawa Barat	2.420.000.000,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.805.596.473,-	APBD
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Jenis	Jawa Barat	720.000.000,-	12	Jenis	Jawa Barat	635.186.617,-	APBD
4.2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	Jawa Barat	1.700.000.000,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.170.409.856,-	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023	Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12	Bulan	Jawa Barat	1.866.000.000,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.311.833.500,-	APBD
5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Jawa Barat	366.000.000,-	12	Bulan	Jawa Barat	98.820.000,-	APBD
5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	Jawa Barat	1.500.000.000,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.213.013.500,-	APBD
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	Jawa Barat	900.000.000,-	12	bulan	Jawa Barat	364.954.480,-	APBD
6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	Jawa Barat	300.000.000,-	12	bulan	Jawa Barat	183.133.000,-	APBD
6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	12	bulan	Jawa Barat	300.000.000,-	12	bulan	Jawa Barat	117.061.480,-	APBD
6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	12	bulan	Jawa Barat	300.000.000,-	12	bulan	Jawa Barat	64.760.000,-	APBD
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	83,25	Persen	Jawa Barat	700.000.000,-	83,25	Persen	Jawa Barat	420.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350.000.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	285.000.000,-	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350.000.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	285.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350.000.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	135.000.000,-	APBD
2.1		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di Kab/ Kota	6	Dokumen	Jawa Barat	350.000.000,-	6	Dokumen	Jawa Barat	135.000.000,-	APBD
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	83,25	Persen	Jawa Barat	700.000.000,-	83,25	Persen	Jawa Barat	394.344.637,-	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350.000.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	394.344.637,-	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil	6	Elemen	Jawa Barat	350.000.000,-	6	Elemen	Jawa Barat	259.344.637,-	APBD
1.2		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan di Kabupaten / Kota	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kab/ Kota	6	Dokumen	Jawa Barat	350.000.000,-	6	Dokumen	Jawa Barat	135.000.000,-	APBD
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	84,78	Persen	Jawa Barat	1.400.000.000,-	84,78	Persen	Jawa Barat	765.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32	Dokumen	Jawa Barat	800.000.000,-	32	Dokumen	Jawa Barat	310.000.000,-	APBD
1.1		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27	Dokumen	Jawa Barat	400.000.000,-	27	Dokumen	Jawa Barat	175.000.000,-	APBD
1.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah rapat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4	Rapat	Jawa Barat	400.000.000,-	4	Rapat	Jawa Barat	135.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis	27	Kab/Kota	Jawa Barat	600.000.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	455.000.000,-	APBD
2.1		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	27	Dokumen	Jawa Barat	300.000.000,-	27	Dokumen	Jawa Barat	300.000.000,-	APBD
2.2		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	108	Orang	Jawa Barat	300.000.000,-	108	Orang	Jawa Barat	155.000.000,-	APBD
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri	100	Persen	Jawa Barat	100.000.000,-	100	Persen	Jawa Barat	75.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan		Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3	Dokumen	Jawa Barat	100.000.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	75.000.000,-	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Proffil Kependudukan dan agregat	3	Dokumen	Jawa Barat	100.000.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	75.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran Rancangan Awal RKPD							19.711.000.000,-	Jumlah Anggaran Hasil Analisis Kebutuhan			15.021.898.388,-	APBD

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kerja adminduk di Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah melakukan sesuai dengan mekanisme Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimana mekanisme yang dilakukan dalam usulan program kegiatan dari masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah, dimana Forum Perangkat Daerah sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat provinsi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrembang kab/kota dengan Perangkat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Mekanisme yang dilaksanakan pada Forum Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Tahap Persiapan

- a. Pembentukan tim penyelenggara oleh Kepala Perangkat Daerah yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah Provinsi yang bersangkutan
- b. Tim penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Menentukan jadwal pelaksanaan dan menyusun agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah;
 - Mengundang calon peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi yang berasal dari delegasi kabupaten/kota yang terkait dengan fungsi Perangkat Daerah skala Provinsi;
 - Mempersiapkan bahan/materi, peralatan, notulen dan berita acara untuk Forum Perangkat Daerah;

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Forum Perangkat Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.SE.M.Eng);
- b. Penyampaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Fungsional Perencana Madya Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Barat (Ir. H. Latief, M.M);
- c. Penyampaian Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Provinsi Jawa Barat (Deny Hermawan, SE, ST, MT);

- d. Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Dr. Taufiq R Hidayat, AP, M.Si.);
 - e. Penyampaian Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat (Hj. Indrastuti Chandra Dewi S, SH,. M. Si.);
 - f. Melaksanakan Desk Dokumen Perencanaan Kab/Kota se-Jawa Barat; dan
 - g. Melaksanakan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
3. Tahap Pasca Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi
- a. Menyusun Berita Acara;
 - b. Menyusun pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi.
- Diharapkan dengan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah diperoleh output yang diinginkan guna mewujudkan pencapaian target kerja adminduk di Jawa Barat.

Tabel T-II.5 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-		-	-	-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2020 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2016 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui : a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk; c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;
3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2023 sebanyak 5 Program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel T-III. 1 Program dan Kegiatan Indikatif Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000,-
				1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,-
		1.2	Kegiatan Administrasi	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.629.069.298,-

			Keuangan Perangkat Daerah	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	60.000.000,-
		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.100.000,-
		1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	635.186.617,-
				1.4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.170.409.856,-
		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.820.000,-
				1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.013.500,-
		1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.133.000,-
				1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.061.480,-
				1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan	64.760.000,-
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	285.000.000,-
		2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	2.2.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	135.000.000,-
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	3.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	3.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	259.344.637,-
				3.1.2	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten / Kota	135.000.000,-
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	4.1.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	175.000.000,-
				4.1.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	135.000.000,-
		4.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	4.2.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	300.000.000,-
				4.2.2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	155.000.000,-
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	5.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	75.000.000,-
Jumlah Kebutuhan Dana						15.021.898.388,-

Jumlah Belanja Operasi untuk Tahun 2023 berdasarkan pagu indikatif Rp. 15.021.898.388,- (Lima belas miliar dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

Tabel T-III. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rencana Kerja dan Pendanaan 2023				Rencana Kerja dan Pendanaan 2024				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai		16.811.000.000,-	A	Nilai		15.955.000.000,-	APBD
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Umum	100	Persen			100	Persen			
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen			100	Persen			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	10	Dokumen	Jawa Barat	350.000.000,-	10	Dokumen	Kota Bandung	400.000.000,-	APBD
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	Dokumen	Jawa Barat	175.000.000,-	7	Dokumen	Kota Bandung	200.000.000,-	APBD
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	Jawa Barat	175.000.000,-	3	Dokumen	Kota Bandung	200.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	3	Dokumen	Jawa Barat	11.175.000.000,-	3	Dokumen	Kota Bandung	11.200.000.000,-	APBD
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	Jawa Barat	11.000.000.000,-	14	Bulan	Kota Bandung	11.000.000.000,-	APBD
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	Jawa Barat	175.000.000,-	3	Laporan	Kota Bandung	200.000.000,-	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	45	Orang	Jawa Barat	100.000.000,-	45	Orang	Kota Bandung	120.000.000,-	APBD
3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45	Orang	Jawa Barat	100.000.000,-	45	Orang	Kota Bandung	120.000.000,-	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	12	Bulan	Jawa Barat	2.420.000.000,-	12	Bulan	Kota Bandung	2.750.000.000,-	APBD
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Jenis	Jawa Barat	720.000.000,-	12	Jenis	Kota Bandung	750.000.000,-	APBD
4.2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	Jawa Barat	1.700.000.000,-	12	Bulan	Kota Bandung	2.000.000.000,-	APBD
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12	Bulan	Jawa Barat	1.866.000.000,-	12	Bulan	Kota Bandung	2.035.000.000,-	APBD
5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Jawa Barat	366.000.000,-	12	Bulan	Kota Bandung	385.000.000,-	APBD
5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	Kota Bandung	1.500.000.000,-	12	Bulan	Kota Bandung	1.650.000.000,-	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rencana Kerja dan Pendanaan 2023				Rencana Kerja dan Pendanaan 2024				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	Jawa Barat	900.000.000,-	12	bulan	Kota Bandung	1.150.000.000,-	APBD
6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	Jawa Barat	300.000.000,-	12	bulan	Kota Bandung	350.000.000,-	APBD
6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	12	bulan	Jawa Barat	300.000.000,-	12	bulan	Kota Bandung	400.000.000,-	APBD
6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	12	bulan	Jawa Barat	300.000.000,-	12	bulan	Kota Bandung	400.000.000,-	APBD
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	83,25	Persen	Jawa Barat	700.000.000,-	84,00	Persen	Kota Bandung	800.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350.000.000,-	27	Kab/Kota	Kota Bandung	400.000.000,-	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350.000.000,-	27	Kab/Kota	Kota Bandung	400.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350.000.000,-	27	Kab/Kota	Kota Bandung	400.000.000,-	APBD
2.1		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di Kab/ Kota	6	Dokumen	Jawa Barat	350.000.000,-	6	Dokumen	Kota Bandung	400.000.000,-	APBD
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	83,25	Persen	Jawa Barat	700.000.000,-	84,00	Persen	Kota Bandung	1.000.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350.000.000,-	27	Kab/Kota	Kota Bandung	1.000.000.000,-	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil	6	Elemen	Jawa Barat	350.000.000,-	6	Elemen	Kota Bandung	500.000.000,-	APBD
1.2		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan di Kabupaten / Kota	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kab/ Kota	6	Dokumen	Jawa Barat	350.000.000,-	6	Dokumen	Jawa Barat	500.000.000,-	APBD
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	84,78	Persen	Jawa Barat	1.400.000.000,-	85,00	Persen	Kota Bandung	1.800.000.000,-	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rencana Kerja dan Pendanaan 2023				Rencana Kerja dan Pendanaan 2024				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32	Dokumen	Jawa Barat	800.000.000,-	32	Dokumen	Kota Bandung	1.000.000.000,-	APBD
1.1		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27	Dokumen	Jawa Barat	400.000.000,-	27	Dokumen	Kota Bandung	500.000.000,-	APBD
1.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah rapat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4	Rapat	Jawa Barat	400.000.000,-	4	Rapat	Kota Bandung	500.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Penyelenggaran Pembinaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis	27	Kab/Kota	Jawa Barat	600.000.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	800.000.000,-	APBD
2.1		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	27	Dokumen	Jawa Barat	300.000.000,-	27	Dokumen	Jawa Barat	400.000.000,-	APBD
2.2		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	108	Orang	Jawa Barat	300.000.000,-	108	Orang	Kota Bandung	400.000.000,-	APBD
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihilaskan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	100	Persen	Jawa Barat	100.000.000,-	100	Persen	Kota Bandung	120.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan		Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3	Dokumen	Jawa Barat	100.000.000,-	3	Dokumen	Kota Bandung	120.000.000,-	APBD
1.1		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Proffil Kependudukan dan agregat	3	Dokumen	Jawa Barat	100.000.000,-	3	Dokumen	Kota Bandung	120.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran Tahun 2023							19.711.000.000,-	Jumlah Anggaran Tahun 2024			19.835.000.000,-	APBD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja 2023 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun 2023.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja 2023 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja 2023 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.